



PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH:

DIAH RAHMI FANTARI
NIM: 11521201419

**PROGRAM STRATA SATU (SI)
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Afrizal Ahmad, M.Sy

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru 25 November 2019

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN SUSKA Riau

Hal : Pengajuan Skripsi

di-

Sdr. Diah Rahmi Fantari

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca meneliti dan memberikan petunjuk dan mengarahkan serta melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Diah Rahmi Fantari** yang berjudul **"PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)"**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Harapan saya semoga dalam waktu dekat ini saudara yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang *Munaqasah* di Fakultas Syariah dan Hukum.

demikian harapan saya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pembimbing


Afrizal Ahmad, M.Sy
NIK: 130217085

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul *PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dlam Rumah Tangga), yang
 ditulis oleh :

Nama : **DIAH RAHMI FAMTARI**
 NIM : 11521201419
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis 26 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas
 Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Shamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap
Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, faktor ekonomi, *nusyuz* istri dll. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri baik secara fisik maupun non fisik. Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan / *library research* dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap istri atau bentuk kekerasan fisik lainnya tidak dibenarkan atau di larang dalam hukum positif yaitu dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk apapun. Dalam Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan. membolehkan memukul istri dengan alasan *nusyuz*. harus dengan melakukan alternative sebelumnya yaitu menasehati istri dan memisahkan tempat tidur. Memukul ini merupakan alternative terakhir yang dilakukan suami. dalam memukul istri harus dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak Jinayah. maka sanksi bagi pelaku Kekerasan terhadap istri terutama kekerasan fisik adalah sesuai dengan hukum positif Pasal 44 Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kekerasan, Pemukulan, *nusyuz*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamain

Alhamdulillahirobbil'alamain, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **”Pemukulan Suami Terhadap Istri pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Islam ”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Alwinta Indra dan ibunda Neli Harti tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasihat, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus yang takkan pernah terganti hingga aku selalu kuat menjalani sertiap rintangan. Ayah dan Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas semua pengorbananmu. Terima kasih juga buat keluarga besar dan keluarga tercinta kakak, abang dan adik-adik ku tersayang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Yusliati, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis serta memberikana bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
9. Terimah kasih penulis ucapkan kepada para sahabat tersyang Rini Wahyuni, Rahmi Husni, Monika Defitri, Oktia Amelia yang memberikan semangat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dukungan dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Terima kasih selama ini sudah menerima penulis apa adanya.

10 Sahabat-Sahabat Penulis yang paling istimewa dari Awal Perkuliahan Gusmila, Fadilah, Lely, Ninik, Taufik, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

11 Teman-teman seperjuangan mahasiswa mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 lokal C: Dika, Dinda, Dinta, Muthia, Nurma, mila, dila, lely, ninik Nurul, meliza, Dedi, David, Anas, Riswan, Pauzan, Syafiq, Syukri, Asep, Aidil, Dedet, Said, taufik yang senantiasa membantu, memberikan dukungan dan semangat.

12. Rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau khususnya Angkatan 2015, Senior, Junior dan Alumni yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.

13 Rekan-rekan KKN Desa Koto Baru Lia, Pane, Nia, Nurma, Nisa, Hanum, Irsyad, Oim, Bobby, Taufiq yang senantiasa membantu, memberikan dukungan dan semangat.

14 Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini serta bermanfaat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

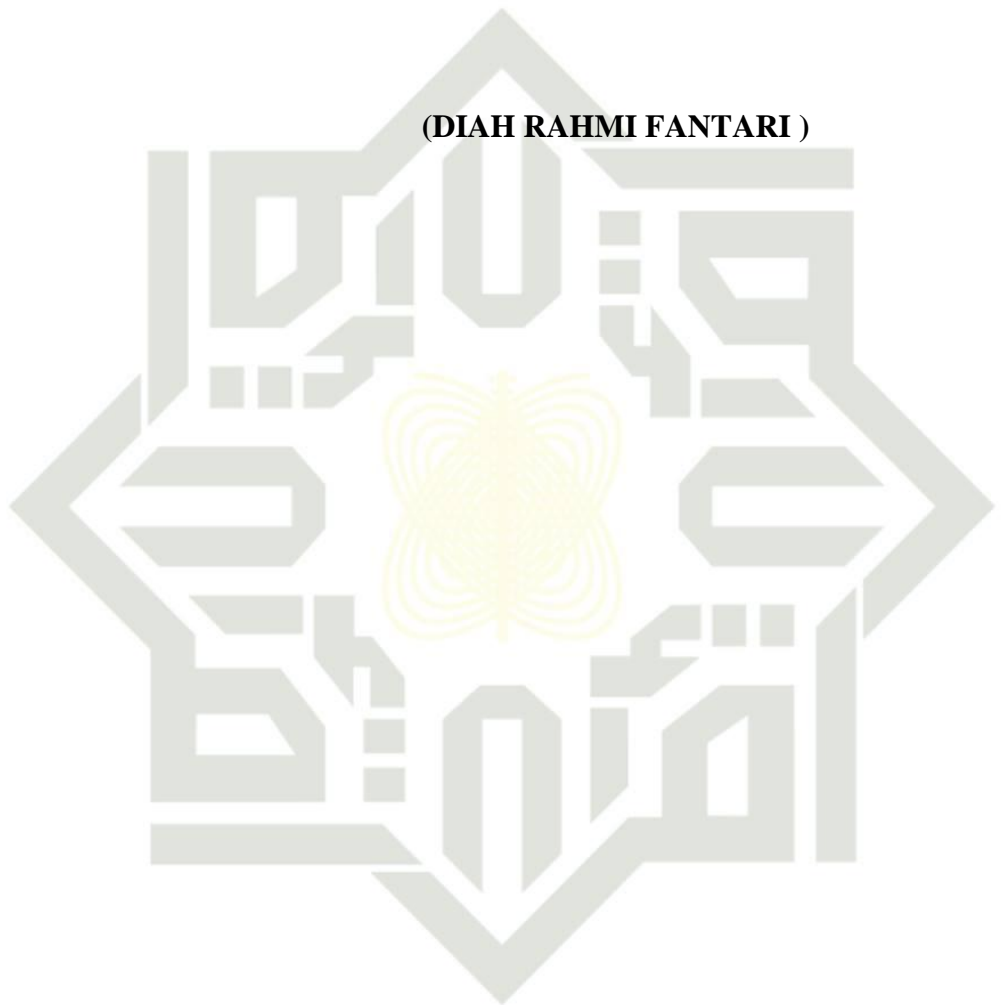
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wr

Pekanbaru, 22 November 2019
Penulis,

(DIAH RAHMI FANTARI)



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM UU NO 23 TAHUN 2004	
A. Sejarah UU No 23 Tahun 2004	14
B. Definisi KDRT Menurut UU NO 23 Tahun 2004.....	17
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
D. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
E. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
F. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
G. Hak-Hak Dan Perlindungan Bagi Korban KDRT	24
BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG KDRT	
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	34
B. Sebab-Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
D. Penanganan Atau Solusi KDRT	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Pemukulan Suami Terhadap Istri Pasal 6 Uu No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	47
B. Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam	51
C. Analisis.....	56

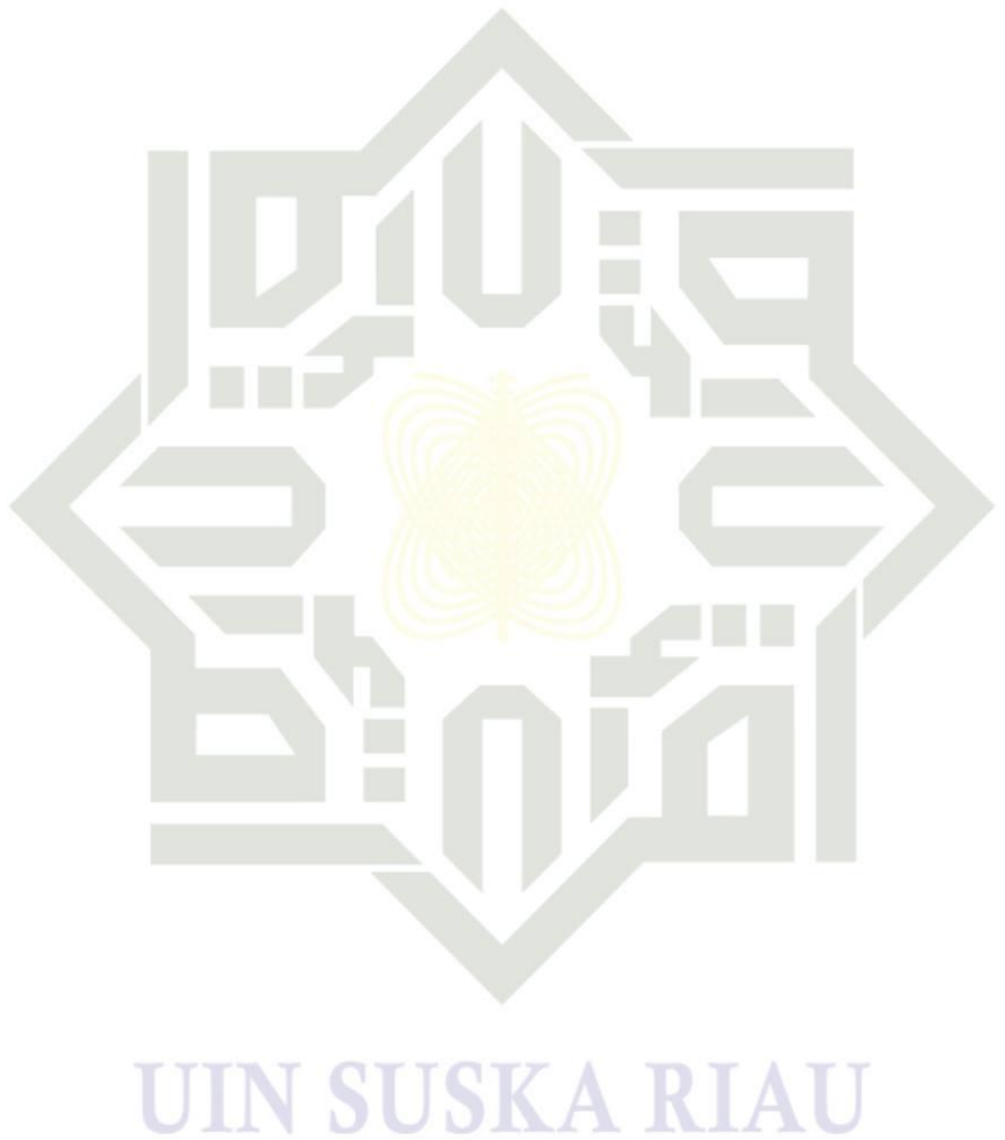
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.¹

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan adanya perkawinan.²

Perkawinann yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki degan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Secara lebih luas perkawinan bisa diartikan sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1998), h. 181

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana 2010), h. 22

³ *Ibid*, h. 8-9

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974. Maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri.. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.⁴

Ketika pasangan suami istri menjalani perannya sebagai keluarga. Pertentangan sering timbul ketika pendapat saling berlawanan, ketidaksenangan terhadap karakter pasangan, perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kebosanan bahkan sampai menimbulkan rasa kebencian dalam keluarga.

Sudah menjadi kodratnya bahwa bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan, yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri antara suami istri, sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istri baik umpatan yang menyakitkan maupun pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Swt.⁵

Dalam kehidupan berumah tangga perselisihan akan menimbulkan sikap ketidakadilan serta penindasan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga, yang dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun

⁴ *Op.Cit,*

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 456

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan, namun realitanya perempuan lah yang sering menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.⁶

Menurut data dari kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indoneesia pada tahun 2018 fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual.

Perlu dipahami bersama bahwa, hubungan suami istri, bukanlah hubungan “Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang

⁶ Roma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁷

Dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga

⁷<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, Di akses pada 28 juni 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.⁸

Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normatif otoritas kepemimpinan

⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam Q.S. al-Nisa'

[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ قَنْتَتُ حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخْلُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁹

Ayat di atas merupakan legitimasi tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang istri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang antara lain suami boleh memukul istrinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat diatas memang melahirkan banyak penafsiran di kalangan ulama, tetapi mayoritas ulama menempatkan hak memukul

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Naladana, 2004), h. 84

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.¹⁰

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang berarti meninggi atau terangkat. Istri nusyuz terhadap suaminya berarti merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya. Sehingga ia merasa tidak lagi berkewajiban untuk mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Dalam hal tentang kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di depan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dilarang oleh suami, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama.

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan Hadits nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri¹¹

Hal ini oleh sebagian orang salah memahami penafsiran terhadap agama yaitu laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan kepemimpinan suami mencakup dalam segala hal tanpa memperhatikan batasan-batasannya, termasuk masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, bahkan sampai melakukan kekerasan dan

¹⁰ Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 7.

¹¹ Rahma Pramudya Mayang Sari, (*Jurnal Al-Ahwal*), *Nusyuz-Marital Rape(Kdrt)*, vol.3. no.1, 2012. h. 70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penindasan terhadap keluarga . Pemahaman yang salah ini sering dijadikan alasan oleh para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan dengan dalih istri telah melakukan nusyuz.¹²

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima‘ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.¹³

Hal inilah yang melatarbelakangi dan membuat tertarik penulis untuk membuat suatu penelitian yang diberi judul: **“Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).

¹² Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: kenacana 2009) h. 190-192

¹³ Syaikh ahmad syakir, *mukhtasar tafsir ibnu katsir* jilid 2 cet 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016),



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemukulan Suami Terhadap Istri Menurut pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Mengetahui Pemukulan Suami Terhadap Istri Menurut UU No 23 Tahun 2004 Pasal 5 dan 6 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b. Untuk dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat, guna kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan / *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena ini studi kepustakaan, maka sumber primernya yaitu, UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Sumber data sekunder, yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai pendukung, seperti : Fiqh Munakahat , buku yang membicarakan mengenai persalan keluarga, kitab undang-undang , media massa dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sumber data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, seperti; kamus besar, katalog perpustakaan, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah ini.¹⁴

Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analitis, yaitu menjelaskan apa yang ada dan memberikan gambaran terhadap penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.¹⁵

Metode Penulisan

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

¹⁵ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 239.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dan memberikan gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengukapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.¹⁶

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang lebih jelas dalam tulisan ini maka disusun sistematika penulisan, yakni sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan, Metode Penelitian, Metode Penulisan, Metode Analisa Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II : pemukulan Suami Terhadap Istri menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari Pengertian kekerasan menurut UU No 23 Tahun 2004, sebab terjadinya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁶ Muhammad Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV : Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).

BAB V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-undang No 23 Tahun 2004

Pada tahun 1967 perserikatan bangsa- bangsa (PBB) melahirkan deklarasi mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Karena deklarasi tersebut tidak mengikat, maka komisi perserikatan bangsa-bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention The Elimination Of All Form Af Discrimination Againt Women*.¹⁷

Karena ketentuan kovensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi sedunia Dasawarsa perserikatan bangsa-bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 menandatangani konvensi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan itu maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskrimnasi terhadap wanita. Dengan undang-undang tersebut diharapkan segala Diskriminasi dapat dihapus di

¹⁷ Hadijah Dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: Stain Ambon Press, 2007), h.15

Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang no tahun 1984 tersebut belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi perempuan di Indonesia.¹⁸

Menurut informasi dari mitra perempuan salah satu lembaga yang memfokuskan diri soal kekerasan, Perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak yang berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga masalah privasi.

Data dari hasil survei kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2006 oleh BPS dan kementerian pemberdayaan perempuan, khususnya mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan menurut pelaku menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1 persen (pelaku suami), 11,7 persen (pelaku orang tua/mertua, anak/cucudan famili), 19,6 persen (pelaku tetangga), 2,5 persen (pelaku atasan/majikan), 2,9 persen (pelaku rekan kerja), 0,2 persen (pelaku guru), dan 8,0 persen (pelaku lainnya).

Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sangat mendominasi pelaku tertinggi adalah suami. Hal ini cukup memprihatinkan. Pada awalnya sebelum diteribkannya undang-undang bahwa seorang korban KDRT sangat sulit mencari keadilan dan mendapatkan

¹⁸ *ibid.*

perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. karena pada saat itu belum ada payung hukumnya.

Komnas perempuan mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan dengan membuat layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lahirnya surat kesepakatan bersama antara menteri pemberdayaan perempuan RI, menteri kesehatan RI, menteri sosial dan kepolisian, pada Oktober 2002 tentang kerja sama dalam layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, yang disikapi dengan pembentukan pusat penanganan terpadu di rumah sakit kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adadlah terobosan awal kebijakan. berlanjut dengan disahkannya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Undang-Undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang ini tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam raelitas sosoiologis sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UU ini merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan pribadi telah masuk dalam wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam KUHP. kasus-kasus pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.¹⁹

Dengan demikian undang-undang ini bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya terhadap mereka yang dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

B. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihail yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, saki atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.²⁰

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana

¹⁹ Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PKDRT*, (Jakarta:s2004), h. 4-7

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dikemukakan dalam pasal 1 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²¹

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh wanita tetap dalam UU PKDRT korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. pasal 1 ayat 3 UU PKDRT menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan secara fisik, psikis dan seksual dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir dan batin yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukan untuk mendidik sebagaimana yang dijarkan agama atau perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, h. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Menurut pasal 5 undang-undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

c) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © milik UIN Suska Riau

persetujuan ataupun perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²²

D. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat UU No 23 tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. jadi apabila seorang istri dianiaya suaminya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor ke pihak yang berwajib.

²² Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, C. Cit, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

adapun dalam undang-undang ini pasal 10 negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga korban berhak mendapatkan:²³

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelayanan bimbingan rohani.

F. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya:

- a. Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak

²³ Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.

Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan misalnya laki-laki kasar, maco, perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapat perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

- e. Antara suami istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti sehingga jika terjadi permasalahan keluarga komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustrasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).²⁴

²⁴ <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/faktor-finansial-yang-memicu-perceraian-dan-pembunuhan-cBRu> di akses pada 29 Agustus 2019

Akibat kekerasan dalam rumah tangga

Korban KDRT pada umumnya akan mengalami stress, dan depresi selain itu korban akan ketakutan dan mengalami trauma sehingga korban akan takut bertemu dengan pelaku dan berujung perceraian. Pelaku KDRT apabila kasusnya diungkap akan berujung penyesalan, malu sampai hukuman penjara. Namun ada juga yang meminta maaf dan bertobat tetapi tidak jarang juga memilih jalan perceraian.²⁵

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut

a. Tinjauan psikologi, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:

- 1) Terisolasi
- 2) Memiliki perasaan tidak berdaya
- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri
- 4) Memiliki harga diri rendah
- 5) Tidak realistis dan memiliki sikap yang pasrah

b. Tinjauan medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

a. Aspek Fisik Korban

- a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri
- b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat

²⁵ Dede rsyad, *hukum pidana dan pranata sosial*, (Jakarta: lembaga study dan kemasyarakatan, 1992), h 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Aspek psikis korban

- c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya)
 - d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan
 - e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran premature.
 - f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.
- a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari lingkungan.
 - b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

G. Hak dan Perlindungan bagi Korban KDRT

kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka persoalan ini menjadi persoalan public. sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang tinggal di lingkup rumah tangga tersebut ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut oleh struktur

dan budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PKDRT ini secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT. Di dalam pasal 10 korban berhak mendapatkan.²⁶

- f. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- g. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- h. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- i. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. pelayanan bimbingan rohani.

Penjelasan pasal 10 huruf a yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan. Pada huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerja sosial.

²⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU PKDRT secara selektif membedakan antara fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga dapat memberi perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi.²⁷ Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

Pasal 16 (1) dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung/ sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.²⁸

²⁷ *ibid*, h. 181

²⁸ Pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 17, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

Pasal 20, kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

Pasal 21 Ayat (1) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidikan kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti

²⁹ Pasal 17, 18, 19, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ayat (2) pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan disarana milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22, Ayat (1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:³⁰

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
- b. Memberikan informasi mengenai hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial yang membutuhkan.

Pasal 23 dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

³⁰ Pasal 20, 21, 22, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 24, dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Pasal 25, dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak hak korban dan proses peradilan
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan bantuan korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, melawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.³¹

Pasal 26, (1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. (2) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tang kepada pihak kepolisian baik ditempat korban maupun ditempat kejadian perkara.

Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

³¹ Pasal 23, 24, 25, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tegangan waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29, permohonan untuk memperoleh surat perintah yang dapat diajukan oleh :³²

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Teman korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping
- e. Pembimbing rohani

Pasal 30, (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera peradilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31, (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan kondisi khusus dan menguabab atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2) Pertimbangan

³² Pasal 26, 27, 28, 29 , Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32, (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33, (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan /atau pembimbing rohani.³³

Pasal 34, (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan /atau pembimbing rohani.

Pasal 35, (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan walaupun pelanggran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas. (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah

³³ Pasal 30, 31, 32, 33, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1 x 24 jam. (3) Penangguhan penahanan; tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36, (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. (2) Penangkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam.³⁴

Pasal 37, Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38, (1) Apabila pengadilan bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan. (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

³⁴ Pasal 34, 35, 36, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Pasal 37 dan 38, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.³⁶

Menurut ahli fikih yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti menganiaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. sehingga menekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk tindak pidana berupa rasa sakit yang menimpa tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota

³⁶ Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

adalah manusia.³⁷ Tetapi tidak semua kekerasan semata-mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis seseorang.

Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan suri tauladan dan saling menyayangi antar sesame tanpa melakukan tindak kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sebagaimana disebutka dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بَالَتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau

³⁷ Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP), *Makalah*, (Surabaya, 2001), h.6

³⁸ Loc.Cit, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berada pada jalan yang benar, serta memberikan pelajaran atau nasihat dengan cara yang baik. Nampak jelas di dalam Al-Qur'an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.³⁹

Dalam al-Qur'an diajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus dibina dengan cara yang ma'ruf. Allah SWT berfirman (QS. An-Nisa'[4]: 19

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

³⁹ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), h. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁰

Ayat diatas mengisyaratkan kepada pasangan suami istri untuk selalu menggauli pasangan dengan ma'ruf. Bergaul dengan cara yang ma'ruf berarti senantiasa berbuat baik kepada pasangan dalam hal disukai maupun tidak disukai. Pasangan suami istri tidak melukan tindakan yang tidak baik satu sama lain apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap pasangan. Dalam hukum Islam kekerasan terhadap istri dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tidak pernah dilegealkan.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri. Sebab dengan alasan *nusyuz* suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasan-batasan yang telahditentukan. sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِذَا أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

⁴⁰ Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴¹

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati kepada kaum wanita. Sebab sebuah himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai atau memonopoli.⁴²

Dalam Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar

⁴¹ Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 84

⁴² Loc. cit, mukhtasar tafsir ibnu katsir jilid 2 cet 3 h. 387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mereka takut kepada Allah Swt. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁴³

Adapun memperbolehkan pemukulan dalam ayat ini dapat dipahami dalam peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang memukuli istrinya dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah saw sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qishas. Dalam riwayat Ibn Murdawaih bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian istri tersebut mengadu kepada Rasulullah beliau bersabda: ia (suami) tidak boleh demikian, kemudian turunlah ayat 34 ini.⁴⁴

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melindungi dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka maka pukulah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh menyakitkan dan melukai.

KDRT sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perspektif agama islam, karenahal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan

⁴³ Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, *Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 345.

⁴⁴ Al-Syayuthi, Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain, (Bandung: Al-Mu'arir, 1991), h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Syiqaq

Syiqaq menurut bahasa dapat diartikan pertengkaran, sedangkan menurut istilah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sehingga keduanya sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipetemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. oleh karena itu bila terjadi konflik seperti ini Allah SWT memberi petunjuk melalui cara tertentu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

⁴⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinyah* (Jakarta:Amzah, 2016), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki mencari sebab permasalahan antara keduanya dan Allah menganjurkan antara pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga.⁴⁷

2. Lemahnya pemahaman atau pengalaman ajaran islam oleh individu umat islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan kerakteristik yang temperamental juga sebagai pemicu seseorang untuk melakukan KDRT.
3. Faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah yang disebabkan oleh faktor ekonomi bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Terkadang ada istri yang menuntut kebutuhan dalam rumah tangga baik kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya. Disitulah berawal pertengakaran suami istri pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah

⁴⁶ Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 85

⁴⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 188

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tingga karena kedua belah pihak tidak dapat mengontrol emosi masing-masing.⁴⁸

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Al-quran sebagai sumber hukum islam memang tidak mencakup terhadap seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan namun banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan cukup menjadi bukti bahwa islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan dalam rumah tangga perspektif islam adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ini diatur dalam surat An-nisa' ayat 34. Dalam ayat ini di jadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang nusyuz. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun kekerasan fisik terpaksa dilakukan suami namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan.

2. Kekerasan Psikis

Selain fisik islam juga memperhatikan kekerasan psikis sebagai mana kisah khaulah binti tsabalah mengadu kepada rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin sami, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat kepada suami, sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizihar suaminya lantaran marah karena pulang tidak ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya. Kerena peristiwa ini turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1-6

⁴⁸ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Mahkamah Vol 9 No 1 (Cirebon: 2015), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang zihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah mendzihar.⁴⁹

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتَى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ② وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

Artinya: 1. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 2. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian

⁴⁹Siti Awaliyah, Skripsi: *Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/ptd. 2011/PA.Ska)*, (Surakarta: 2011) hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. 5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.⁵⁰

Menurut sayyid sabiq bergaul dengan cara yang baik pada hakikatnya sama dengan menghormati istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan.⁵¹

3. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak ini disebut dengan marital rape, yaitu istri mendapat kekerasan seksual suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami

⁵⁰ Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 542

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.160

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.⁵²

Hal ini berarti suami yang menggauli istri dengan baik menjadi petanda ketinggian budi pekerti suami sendiri dan sebaliknya, suami yang berbuat kasar terhadap istrinya menjadi petanda rendahnya budi pekerti suami.

4. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah apabila suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu yang termasuk penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suami. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman pada masa kenabian, sudah jelas bahwa Islam tidak mentoleransi segala bentuk penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

D. Penanganan atau Solusi KDRT

Dalam surah an-nisa ayat 34 menerangkan bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga dan kewajiban seorang istri itu mentaati perintah suami. jadi jika seorang istri tidak mentaati atau membantah perintah suami akan terjadi sikap nusyuz dari istri. nusyuz dari pihak istri Islam memberikan langkah-langkah yang dilakukan suami untuk seorang istri tersebut. agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga suami istri dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Suami adalah sebagai pemimpin keluarga. dimana seorang pemimpin harus melihat dan menghargai sisi baik yang dimiliki pasangannya. suami harus menghindari sikap dirinyalah yang berkuasa atau membanggakan dirinya sendiri.
- b. Jalankan kewajiban suami istri dengan sebaik mungkin, sering terjadi kekerasan karena persoalan ekonomi maka dari itu sebaiknya istri memberi semangat kepada suami dalam menacari rezeki untuk keluarganya.
- c. Berikan nasihat jika salah satu pasangan berbuat salah, bukan malah membentak atau menyakiti hati pasangan.
- d. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan penuh kesabaran.
- e. Adanya komunikasi yang baik antara suami istri agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan harmonis. jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada kerukunan diantara kedua belah pihak itu bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Butuh rasa saling percaya, pengertian dan saling menghargai antar anggota keluarga. sehingga rumah tangga dihiasi dengan rasa saling percaya, jika tidak ada rasa saling percaya maka akan timbul sikap kecemburuan dan curiga yang berlebihan.⁵³

⁵³ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 33-35



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebabagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah *nusyuz*. Berkaitan dengan *nusyuz* ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kekerasan kerana tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah. Sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri Hingga sampai menyakiti dan melukai istri adalah hukuman ta'zir yaitu yang hukumannya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. maka dari itu suami jangan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Jangan melakukan kekerasan yang dapat meyakiti istri. ketika terajadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan. bagi istri taatlah kepada suami selama itu tidak dilarang oleh syara'. Adanya rasa saling menyayngi, saling menghargai antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Menjalankan hak dankewajiban antara suami istri dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan cara baik-baik, maka

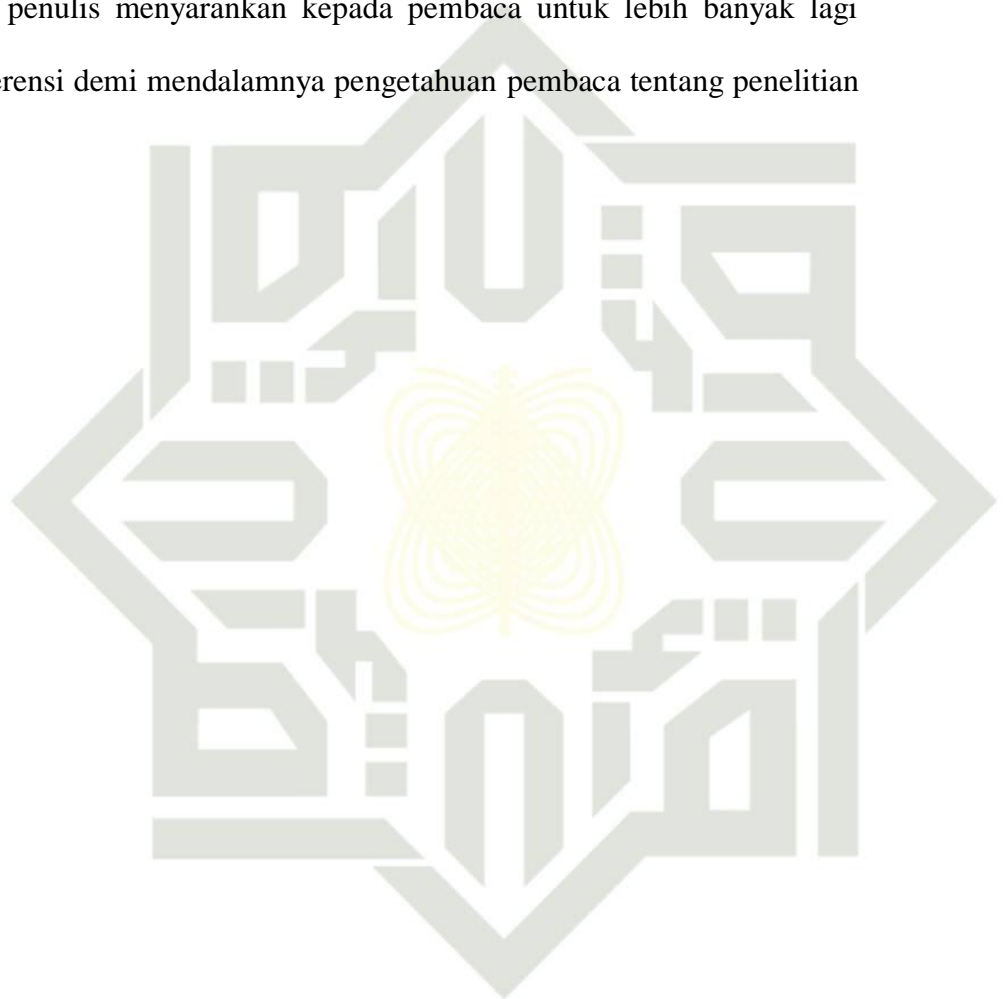
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

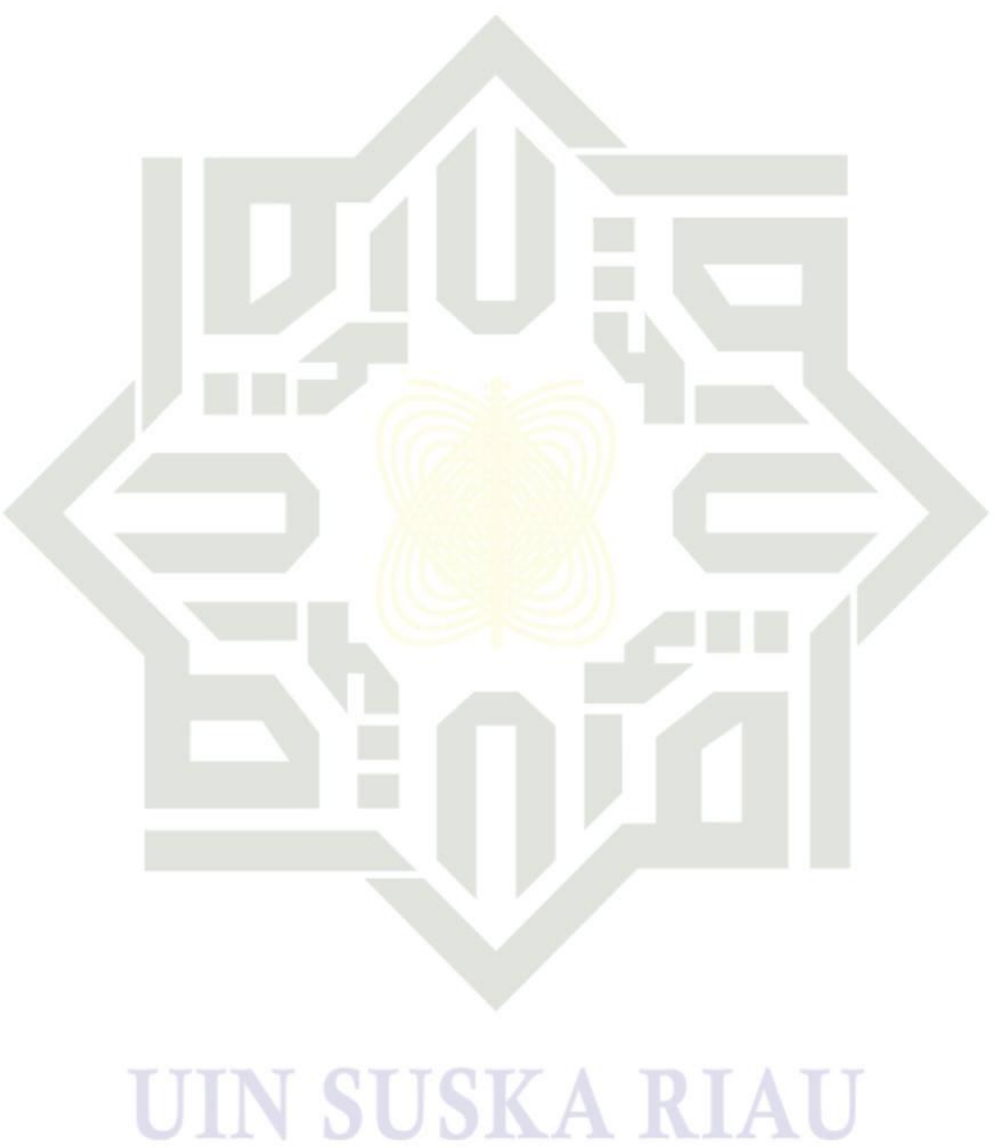
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan keluarga akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Penulis menyadari akan jauhnya tulisan ini dari kata sempurna. segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan kajian ulang. penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih banyak lagi membaca referensi demi mendalamnya pengetahuan pembaca tentang penelitian



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Al-Syayuthi, Labaibun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain, Bandung: Al-Mu'arir, t.t
- Amad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Ali Yusuf As-Subki, 2011, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah,
- Amir syarifuddin, 2009, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: kenacana
- Aroma Elmina Marta, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press,
- Badan pusat statistik dan kementerian Negara pemberdayaan perempuan RI, 2007,
- Dede rsyad, 1992, *hukum pidana dan pranata sosial*, Jakarta: lembaga study dan kemasyarakatan,
- Departemen Agama Republic Indonesia, 2004, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Cv Naladana,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, Jakarta: Balai Pustaka,
- Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Mahkamah Vol 9 No 1 Cirebon 2015,
- Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istimbath Jurnal Hukum Islam Vol. 15, No. 2, Mataram: 2015
- Farcha Cieck, , 2005, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadijah Dan La Jamaa, 2007, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ambon: Stain Ambon Press,
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Imam Abu Zakariya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Riyadh Al-Shalihin*, Surabaya: Darul Ulum, t.th

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PKDRT*, Jakarta: 2004

Aluludun Muhammad Bin Almad Al-mahalli, 2006, *Tafsir Jalalain (Bahrin Abu Bakar)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo,

Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Burhan Bungin, 2008, *penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana,

Muhammad Husein, 2001 *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* , Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,

Mustafa Kemal Pasha, 2003, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,

Nurul Irfan, Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinyah* Jakarta:Amzah,

Rahma Pramudya Mayang Sari, (*Jurnal Al-Ahwal*), *Nusyuz-Marital Rape(Kdrt)*, vol.3. no.1, 2012,

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, 2006, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto,

Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP), *Makalah*, Surabaya, 2001,

Siti Awaliyah, Skripsi: *Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/ptd.G/2011/PA.Ska.)* Surakarta, 2011,

Suharsimi dan Arikunto, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,

Yaikh Ahmad syakir, 2016, *mukhtasar tafsir ibnu katsir* jilid 2 cet 3, Jakarta: Darus Sunnah,

Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers,

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani,

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007, Jakarta: Sinar Grafika,

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani,



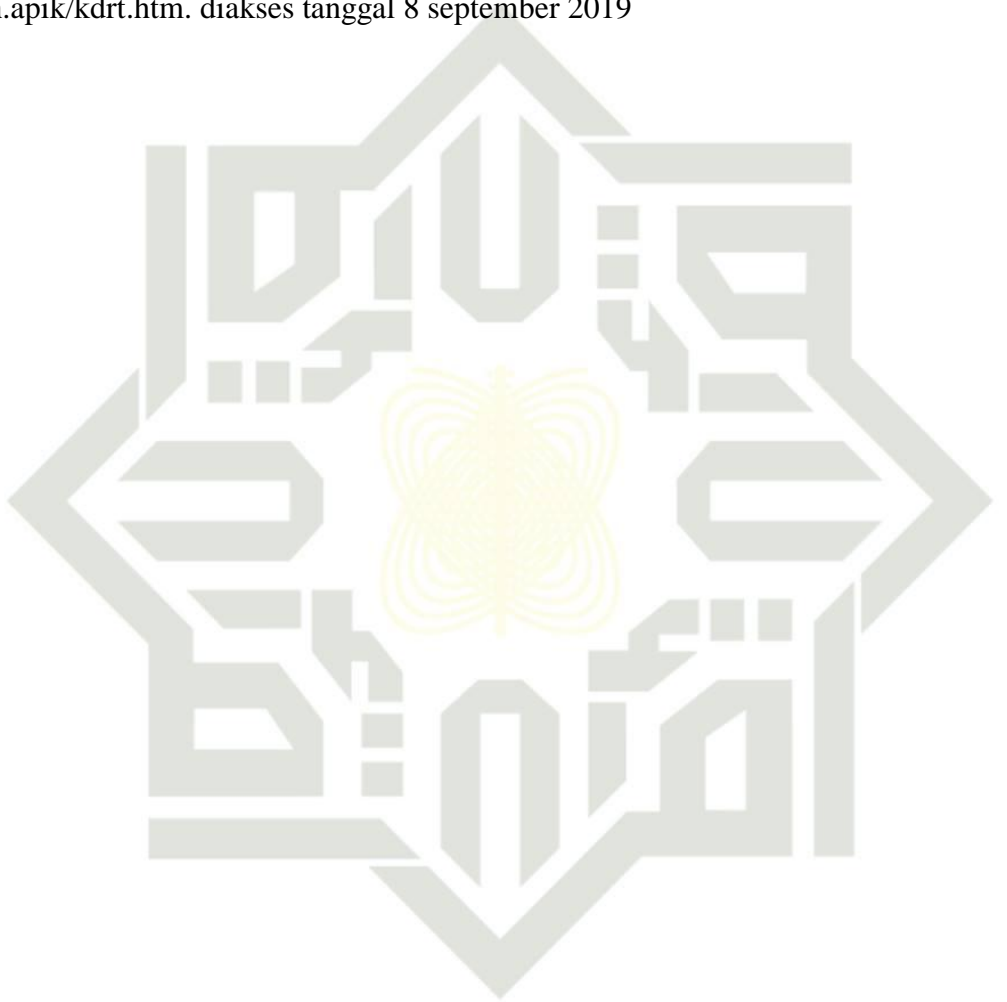
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, Di akses pada 28 juni 2019

<http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/faktor-finansial-yang-memicu-perceraian-dan-pembunuhan-cBRu> di akses pada 29 Agustus 2019

LBH APIK Jakarta, *bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga*, (makalah), <http://www.lbh.apik/kdrt.htm>. diakses tanggal 8 september 2019



UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 Uu No 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dlam Rumah Tangga)*, yang
ditulisoleh :

Nama : **DIAH RAHMI FANTARI**

NIM : 11521201419

Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis 26 Desember 2019

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas
Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag


.....

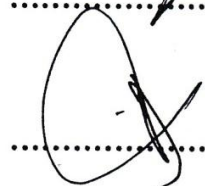
Sekretaris

Syamsuddin Muir, Lc, MA


.....

Penguji I

Dr. H. Suhayib, MA


.....

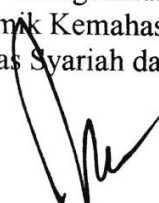
Penguji II

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA


.....

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DIAH RAHMI FANTARI**

NIM : **11521201419**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA**

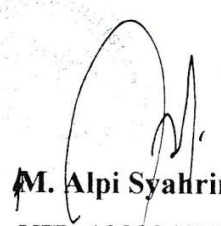
Judul : **PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Pembimbing : **Afrizal Ahmad, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



BIOGRAFI PENULIS

Diah Rahmi Fantari dilahirkan di Kabupaten Sijunjung Kecamatan Lubuk Tarok tepatnya di Desa Lalan pada tanggal 7 Mei 1996. Anak ke dua dari empat bersaudara pasangan dari bapak Alwinta Indra dan ibu Neli Harti. Penulis memiliki tiga saudara, saudara pertama Aldino bekerja sebagai wiraswasta, kedua Teguh bekerja wiraswasta, ketiga Amanda masih sebagai pelajar. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 6 Lalan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009.

Pada tahun itu penulis juga melanjutkan pendidikan di madrasah tsanawiyah negeri sijunjung, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian setelah tamat dari sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di madrasah Aliyah negeri 1 sijunjung dan tamat pada tahun 2015. Setelah selesai dari pendidikan sekolah menengah atas, penulis punya keinginan yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan yang diinginkan. Berkat usaha dan do'a dari kedua orang tua, penulis mendapat kesempatan untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penulis menyelesaikan strata satu (S1) pada tahun 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.